



**PROSES INTEGRASI MASYARAKAT TIONGHOA AKIBAT
DISKRIMINASI RASIAL DI GLODOK PASCA KERUSUHAN MEI 1998
(1998-2001)**

***CHINESE SOCIETY INTEGRATION PROCESS AS A RESULT OF RACIAL
DISCRIMINATION IN GLODOK POST THE MAY 1998 RIOT (1998-2001)***

Sofyan Hamid Azhari¹, Budiaman, Abdul Haris Fatgehipon³

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

Email : sofyanhamidazhari@gmail.com¹ , budiaman.fisunj@gmail.com² , ahfatgehipon42014@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 10-06-2024

Revised : 16-06-2024

Accepted : 18-06-2024

Published: 20-06-2024

Abstract

The May 1998 riots were an incident of racial discrimination that occurred because of stereotypes that developed in society and then were vented in the May 1998 riots which were initially a student movement that became an anti-Chinese movement. Chinese people have to live with the stereotypes inherent in society. To be able to live side by side, the Chinese community must go through a long integration process. This research aims to analyze the integration process of the Chinese community in Glodok. This study used qualitative research methods. The data collection techniques used were observation, interviews, documents and literature study. Meanwhile, the data analysis technique in this research uses data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results of the research show that the integration process of Chinese society was supported because: 1) There was conflict in society which then gave rise to awareness that they had the same rights as Indonesian citizens 2) Policies implemented by the BJ Habibie Government 3) Policies implemented by the Gus Dur Government which then we can free the ethnic Chinese community from the shackles of policies that have restricted them since the New Order era.

Keywords: *Racial Discrimination, Chinese, May 1998 Riots*

Abstrak

Peristiwa kerusuhan Mei 1998 merupakan peristiwa diskriminasi rasial yang terjadi karena adanya stereotype yang berkembang di masyarakat kemudian dilampiaskan pada kerusuhan Mei 1998 yang awalnya merupakan Gerakan mahasiswa menjadi Gerakan anti Tionghoa. Masyarakat Tionghoa harus hidup dengan stereotype yang melekat di masyarakat. Untuk bisa hidup berdampingan masyarakat Tionghoa harus melalui proses integrasi yang Panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses integrasi masyarakat Tionghoa di Glodok . Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumen, dan studi pustaka. Sedangkan dalam Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses integrasi masyarakat Tionghoa didukung



karena : 1) Adanya konflik di masyarakat yang kemudian memunculkan kesadaran bahwa mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia 2) Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintahan BJ Habibie 3) Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintahan Gus dur yang kemudian bisa membebaskan masyarakat etnis Tionghoa dari belenggu kebijakan yang membatasi mereka sejak era orde baru.

Kata Kunci : Diskriminasi Rasial, Tionghoa, Kerusuhan Mei 1998

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, termasuk suku, agama, ras, dan adat istiadat. Menurut sensus BPS tahun 2010 yang dikutip dari website indonesia.go.id, terdapat 300 kelompok etnis dan 1.340 suku bangsa di Indonesia, salah satunya adalah etnis Tionghoa atau yang sering disebut "orang Cina". Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia bermula dari gelombang migrasi yang meningkat dari Cina ke Indonesia sekitar abad ke-19, sehingga membawa imigran Cina yang menetap hingga dua atau tiga generasi dan hidup berdampingan dengan penduduk pribumi. Meskipun begitu, etnis Tionghoa dikenal karena selalu menjunjung tinggi budaya, pola kehidupan, dan tradisi leluhur mereka, sehingga mereka terus melestarikan tradisi dan adat istiadat mereka meskipun berada jauh dari tanah asalnya (Kurniawan, 2020)

Salah satu wilayah di Jakarta, yaitu Glodok di Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. merupakan salah satu wilayah yang strategis dan memiliki karakteristik yang beragam. Jika Jakarta dikenal dengan penduduknya yang berasal dari etnik Betawi atau Jawa sebagai etnik yang paling banyak menduduki, maka di Glodok kita akan menemukan masyarakat Tionghoa. Masyarakat keturunan Tionghoa beraktivitas berdampingan dengan masyarakat dari etnik lainnya sebagai pedagang ataupun berwirausaha dengan membuka berbagai usaha khas China. Secara bersamaan, keberagaman di Glodok menjadi potensi munculnya konflik yang meledak pada 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran yang membuat situasi menjadi tidak terkendali.

Pada 13-14 Mei 1998 merupakan hari penting bagi etnis Tionghoa di Indonesia karena di dua hari itu terjadi kerusuhan besar-besaran di Jakarta dan Solo. Tidak hanya terjadi pembunuhan dan pembakaran tapi juga pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa yang dilakukan secara sistematis. Masyarakat Tionghoa sebagai kaum minoritas tidak mendapatkan perlindungan sama sekali dari para penguasa. Mereka yang berhasil menyelamatkan diri ada yang keluar negeri, tapi sebagian besar juga menetap di Indonesia. Peristiwa ini mengejutkan masyarakat Tionghoa di Indonesia dan dunia Internasional (Suryadinata, 2010).

Situasi tersebut membawa dampak buruk bagi bangsa Indonesia termasuk salah satunya etnis Tionghoa. Pada 1998 terjadi peristiwa yang merenggut beribu jiwa penduduk Tionghoa di Indonesia, rusaknya rumah dan toko yang dimiliki Tionghoa, lebih dari seratus keturunan Tionghoa diperkosa dalam beberapa hari setelah tragedi berlangsung. Kerusuhan ini merambat ke beberapa toko yang dianggap sebagai milik etnis Tionghoa. Wilayah Glodok menjadi salah satu wilayah yang mengalami kerusakan setelah kerusuhan.

Sentimen anti-Tionghoa merupakan kondisi yang dinamakan *Sinophobia* atau anti-Tionghoa (Kiawan, 2018) yang dimaksud adalah ketakutan dan ketidaksukaan terhadap China, orang Tionghoa, dan budaya Tionghoa. Sentimen ini ditujukan kepada minoritas Tionghoa yang



tinggal di luar China yang menjadi minoritas. Sentimen anti-Tionghoa sudah ada di seluruh dunia sejak abad ke-20.

Sentimen anti-Tionghoa tetap terawat bahkan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Saat itu Indonesia memiliki lebih dari 633 suku namun politisi Indonesia saat itu tidak menganggap bahwa Tionghoa, Arab, dan Eropa sebagai bangsa Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah ini pemerintah membantuk Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) pada 1945. Tugas Baperki adalah untuk memperjuangkan hak dan nasib warga Tionghoa Indonesia yang menginginkan pengakuan kelompok etnisnya oleh pemerintah Indonesia tanpa melakukan asimilasi (Aryani, 2022).

Kemudian segregasi juga antara pribumi dan non-pribumi juga terasa kental dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yaitu pada pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan “Presiden adalah orang Indonesia asli”, dan pasal 26 “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Dengan kata lain bahwa warga keturunan Tionghoa tidak dianggap sebagai warga negara asli meskipun lebih dari 43% etnis Tionghoa lahir di Indonesia. Segregasi tersebut memicu adanya lima kerusuhan anti-Tionghoa yang berlokasi di Jawa dan Sumatera pada 1945 hingga 1947 (Pertiwi, 2021)

Sentimen ini kemudian berlanjut saat rezim Orde baru dengan tragedi berdarah yaitu G30S dimana para jenderal AD/TNI dibunuh satu persatu dan dalang dari peristiwa ini diyakini adalah Parta Komunis Indonesia. Karena PKI dijadikan sebagai dalang dalam peristiwa ini berimbas kepada etnis Tionghoa yang identic dengan komunis. Hal ini membuat etnis Tionghoa semakin sulit untuk tinggal di Indonesia. Setelah Soekarno lengser keturunan Tionghoa yang berada di bawah organisasi Baperki diperlakukan semena-mena dan dengan kekerasan karena dianggap bagian dari PKI. Kemudian intimidasi dilakukan oleh Orde Baru di bawa pimpinan Soeharto dan menanggapi masyarakat Tionghoa berhaluan kiri dan sepaham dengan PKI. Orde baru melakukan pembunuhan, penyiksaan, dan pemenjaraan tanpa sebab karena atas dasar keturunan Tionghoa dengan PKI atau Komunis. (Aryani, 2022).

Rezim Soeharto melakukan operasi penumpasan G30S yang memakan ribuan jiwa pribumi dan etnis tionghoa. Pada Juli 1967, Soeharto mengeluarkan keijakan yang melarang istilah Orang Tionghoa dan menggantinya dengan Orang Cina yang memiliki tendensi menghina. Soeharto juga mengeluarkan instruksi Presidium Kabinet mengenai Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina untuk mempercepat proses pembauran atau asimilasi. Regulasi tersebut membatasi hak keturunan Tionghoa hampir semua aspek seperti agama, sosial budaya, Pendidikan, media, ekonomi, dan politik (Pertiwi, 2021). Di era orde Baru keberadaan stigma etnis Tionghoa sangat kuat di masyarakat. Stigma yang melekat adalah etnis Tionghoa adalah etnis yang membuat kerusuhan dan suka memonopoli perekonomian lokal (Aryani, 2022).

Soeharto kemudian menganggap bahwa keturunan etnis Tionghoa sebagai pendukung PKI sehingga dibekukannya diplomatic antara RI dan RRT yang selanjutnya dikeluarkan kebijakan asimilasi yang diterapkan secara menyeluruh. Soeharto menginginkan etnis Tionghoa melakukan asimilasi pada setiap aspek kehidupan di Indonesia hal ini harus dilakukan karena pemerintah menganggap bahwa etnis Tionghoa bagian dari Partai Komunis Indonesia. Keturunan etnis Tionghoa dikalim sebagai benih komunis. Segala sesuatu yang berhubungan PKI atau komunis



ditindak tegas oleh pemerintah termasuk organisasi atau perhimpunan Tionghoa (Risky Ananda Putri, 2022)

Kemudian presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang mengatur agama dan budaya etnis Tionghoa yang hanya boleh dilakukan dalam lingkungan keluarga saja dan tertutup. Adanya instruksi yang dikeluarkan ini berdampak kepada agama yang dianut oleh etnis Tionghoa seperti *Khong Hoe Tjoe, cap go meh, Cing Bing, Twan Yang, Tangcik*, dan berbagai keagamaan lainnya dilarang melaksanakan ibadah. *Khon Hoe Tjoe* atau kini disebut konghucu tidak diakui sebagai agama pada orde baru hanya sebagai bentuk kepercayaan etnis Tionghoa (Risky Ananda Putri, 2022)

Pemerintah orde baru juga menetapkan peraturan terhadap etnis Tionghoa melalui Presidium Kabinet No. 37/U/IN/6/1967 yang berisi mengenai kebijakan yang merombak peraturan yang menyangkut WNA Tiongkok. Keputusan ini mempertajam asimilasi yang berada di Indonesia tertuang pada pasal 3, Keputusan Presiden Republik Indonesia No.240 tahun 1967 tentang pembinaan warga negara keturunan asing dijalankan untuk mencegah terjadinya diskriminasi ras dan sosial. Kemudian pada 10 April tahun 1969 pemerintah mengeluarkan UU No.4 tahun 1969 yang berisi mengenai Perjanjian Dwi Kewarganegaraan yang dimana aturan ini secara langsung merujuk kepada etnis Tionghoa yang belum melakukan sumpah pada masa pemerintahan Soekarno (Risky Ananda Putri, 2022).

Pada tahun 1997 dimana Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi, nilai mata uang Rupiah menurun dari Rp2.600 menjadi Rp16.000 per dollar AS. Hal ini berdampak pada perusahaan yang bangkrut dan mengharuskan memutus hubungan kerja dengan pegawai-pegawainya karena kebutuhan pokok yang meroket. Di sisi lain, pemerintah juga kehilangan legitimasi karena adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran yang membuat situasi menjadi tidak terkendali. Tim Usakti (Ginting, M, & Ekwandari, 2019) mencatat selama survei bahwa sekitar 218 toko, 165 ruko, 155 bank, 91 perkantoran, 32 pusat pertokoan, 2 menara apartemen di Pluit, 21 rumah, dan beberapa gudang serta hotel.

Pasar di glodok menjadi sasaran kerusuhan massa pada 14 Mei 1998. Awalnya penjual menganggap massa yang berkumpul ingin melakukan aksi demonstrasi, sehingga mereka tidak curiga. Spontan mereka melakukan aksi melempari toko dan mencoba masuk menjarah. Pemilik toko tidak bisa menyelamatkan barang-barangnya yang mereka pikirkan hanyalah selamat dari kepungan perusuh. Massa yang awalnya melakukan pengrusakan sejumlah fasilitas berubah menjadi gerakan anti Tionghoa. Isu bahwa Glodok akan dijadikan target utama menyebar cepat di kalangan buruh, supir angkot, tukang parkir dan sebagainya. Namun kalangan etnis Tionghoa tidak mendengar isu tersebut karena pribumi tidak memberitau. Hal ini terlihat bahwa antara etnis Tionghoa dengan Pribumi tidak terjalin dengan baik dari aspek sosial. Masyarakat merusak dan menjarah barang-barang elektronik milik penjual yang menyebabkan sekitar 297 kios rusak. Ada juga barang dagangan yang dibakar massa. Masyarakat Tionghoa mengalami trauma mendalam akibat kerusuhan tersebut. Polisi dan TNI mencoba mengamankan tetapi massa terlalu banyak sehingga aparat keamanan tidak mampu meleraai aksi tersebut (Titulanita, Sumardiati, & W, 2015).



Kerusuhan pada 1998 terjadi akibat berbagai faktor diantaranya: akibat adanya isu rupiah akan menaik, politik nasional, dan terjadinya *panic buying* di masyarakat. Yang melakukan rata-rata adalah orang-orang yang memiliki modal besar sedangkan masyarakat miskin hanya bisa membeli sesuai dengan kebutuhan. Dari keadaan tersebut, muncul prasangka dari kalangan pribumi kepada orang Tionghoa yang dituduh sebagai tukang timbun, cari untung, dan tidak memperdulikan keadaan masyarakat miskin. Sehingga berkembang menjadi ketidaksukaan pribumi terhadap etnis Tionghoa (Titulanita, Sumardiati, & W, 2015).

Pada peristiwa ini juga ditemukan adanya pemerkosaan terhadap sejumlah perempuan yang berasal dari etnis Tionghoa saat kerusuhan berlangsung. Berdasarkan temuan TGPF bahwa Tindakan kekerasan seksual ini terjadi secara spontan di berbagai tempat dalam waktu yang hampir bersamaan termasuk wilayah Glodok. Setidaknya terdapat 85 kasus kekerasan seksual di Jakarta, Medan dan Surabaya. Yunita dari Lembaga Bantuan Hukum menjelaskan bahwa dari 85 kasus, sebanyak 52 kasus diantaranya adalah pemerkosaan secara beramai-ramai, 14 kasus dengan penganiayaan, 10 penganiayaan seksual, dan 9 pelecehan seksual.

Kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998 meninggalkan bekas luka bagi sejumlah orang yang mengalami langsung kerusuhan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh BBC Indonesia kepada sejumlah orang yang menyaksikan atau mengalami selama kerusuhan berlangsung bahwa mereka mendapatkan ancaman hingga mau dibakar dan dibunuh oleh massa. Candra Jap yang saat itu berumur 15 tahun mendengarkan teriakan dari masa “bakar Cina, bunuh Cina, jahar”. Sepanjang hari Canda melihat orang-orang berseliweran membawa barang yang diambil dari pertokoan. Muhamad Ridwan (57) yang saat itu juga berada di dapur restoran padang miliknya melihat bahwa massa yang tiba-tiba menjadi beringas membuka pintu-pintu toko lalu mengambil barang di dalamnya. Karena khawatir Ridwan langsung pulang Bersama karyawannya tanpa memperdulikan restorannya. Keesokan harinya saat Ridwan Kembali ke Glodok, restorannya terbakar habis dan tak ada yang bisa diselamatkan.

Pada 1998 terjadi peristiwa besar melanda Indonesia yang melibatkan etnis Tionghoa. Pasca peristiwa 98 meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan persepsi terhadap ras Tionghoa. Kesadaran ini melahirkan berbagai regulasi anti diskriminasi Tionghoa dan menerima mereka sebagai warga negara yang dikeluarkan oleh B.J Habibie dan Abdurahman Wahid. B.J.

Pada masa pemerintahan Presiden Habibie sebagai permulaan dari reformasi muncul berbagai partai politik baru yang didominasi oleh partai etnis Tionghoa. Partai tersebut yaitu Partai Reformasi Tionghoa (Parti), Partai Pembauran Indonesia dan Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI). Sebagian masyarakat Tionghoa lainnya yang tidak membuat partai politik membuat LSM yang bergerak di bidang etnis Tionghoa yaitu Paguyuban Marga Sosial Tionghoa Indonesia (kemudian berganti menjadi Perhimpunan Keturunan Tionghoa Indonesia), Gandi, Solidaritas Nusa-Bangsa, Simpatik, dan sebagainya yang dibentuk khusus terhadap diskriminasi rasial di Indonesia (Suryadinata, 2003).

Setelah munculnya organisasi dan partai yang didirikan oleh etnis Tionghoa, penggunaan Bahasa mandarin sebagai Bahasa ibu etnis Kembali boleh digunakan. Majalah dan kamus dengan Bahasa mandari diperjualbelikan di Jakarta. Pada 1999 terdapat 10 koran berbahasa cina dapat terbit setelah berlangsungnya pemilihan umum (Risky Ananda Putri, 2022)



Habibie mengeluarkan instruksi yang melarang istilah pribumi dan non-pribumi pada kebijakan resmi pemerintahan dan bisnis, serta memastikan peluang yang sama untuk seluruh warga Indonesia tanpa melihat agama, etnis, dan ras. Instruksi yang dimaksud adalah Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Adanya instruksi Presiden tersebut untuk mewujudkan persamaan kedudukan hukum hingga memperkuat persatuan.

Presiden berikutnya yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga memperjuangkan agar warga negara setara dengan etnis lainnya. Pada 1998 Gus Dur juga tampil saat masa-masa sulit etnis Tionghoa. Gus Dur melihat realita sosial masyarakat Tionghoa mendapatkan diskriminasi yang ada di Indonesia dari berbagai aspek, diskriminasi yang diterima oleh masyarakat Tionghoa yaitu Ibadah, diskriminasi dalam bidang Pendidikan, diskriminasi dalam perkawinan, diskriminasi di Kartu Tanda Penduduk, diskriminasi huruf, orang Tionghoa dipaksa asimilasi, dan sulitnya akses menjadi PNS (Mustajab, Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia, 2015).

Gus Dur mencabut larangan bagi warga Tionghoa merayakan Imlek lewat Keppres Nomor 6 Tahun 2006 yang mematahkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China yang dikeluarkan Soeharto saat masa Orde Baru. Gus Dur menganggap bahwa etnis Tionghoa menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang dimana mereka harus setara dalam mendapatkan hak-haknya. Gus Dur kemudian dinobatkan sebagai “Bapak Tionghoa Indonesia” berkat kebijakan yang dikeluarkannya untuk masyarakat etnis Tionghoa.

Berdasarkan prapenelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat Tionghoa di Glodok saat survey dan melakukan wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa di Glodok masih ingat akan peristiwa yang terjadi pada Mei 1998. Peristiwa tersebut meninggalkan trauma bagi sebagian masyarakat etnis Tionghoa di Glodok terutama bagaimana sentiment yang melekat ketika era orde baru. Masyarakat Tionghoa di Glodok harus mengalami proses integrasi mulai dari kesadaran individu, sistem masyarakat, dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Proses ini mengalami proses perjalanan yang panjang hingga masyarakat di Glodok bisa hidup berdampingan.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengangkat judul “Proses Integrasi Masyarakat Tionghoa Akibat Diskriminasi Rasial di Glodok pasca Kerusuhan Mei 1998 (1998-2001)” untuk meneliti apa yang terjadi, dampak yang dirasakan, dan bagaimana proses integrasi masyarakat Tionghoa di Glodok pasca kerusuhan Mei 1998 pada periode 1998-2001. Peneliti ingin mengetahui bagaimana proses integrasinya sehingga dapat menjalankan aktivitas sosial-budaya tanpa adanya sentiment anti-Tionghoa.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Leedy & Ormrod bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam konteks natural dimana peneliti tidak berusaha memanipulasi fenomena yang diamati (Samiaji Sarosa, 2017)

Cresswell, J.W dalam bukunya yang berjudul *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches* (Ihwan Nudin, 2016) mendefinisikan bahwa kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh



dan kompleks yang disajikan lewat kata-kata, mendapatkan informasi terperinci yang diperoleh dari informan, dan dilakukan dengan latar alamiah.

Lokasi Penelitian

Lokasi berada di Glodok, DKI Jakarta. Selama melakukan penelitian, peneliti akan berusaha untuk memperoleh informasi detail demi menunjang keberhasilan penelitian. Glodok adalah kelurahan yang terletak di Kecamatan Taman Sari, DKI Jakarta, Indonesia. Sejak masa Hindia Belanda daerah ini dikenal sebagai pecinan terbesar di Batavia. Kini Mayoritas warga Glodok adalah warga keturunan Tionghoa. Glodok dikenal sebagai salah satu sentra penjualan elektronik dan area cagar budaya masyarakat Tionghoa.

Uraian Masalah atau Alasan Penelitian

Bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional, memainkan peran penting dalam menyatukan bangsa yang beragam. Namun, proses standarisasinya menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektifitas dan penerimaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika tantangan dan pencapaian dalam proses tersebut, yang penting untuk pengembangan kebijakan bahasa di masa depan.

Metode Pengumpulan Data

Pada suatu penelitian maka mengumpulkan data adalah bagian terpenting agar penelitian bisa lancar dilaksanakan. Maka dari itu, pada penelitian kali ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun ke lokasi mengamati hal-hal dengan peristiwa, waktu, tempat, pelaku, ruang, kegiatan, benda-benda, tujuan, dan perasaan. (Djunaidi Ghony, 2020).

2. Wawancara

Menurut Kartono bahwa wawancara adalah percakapan yang membicarakan masalah tertentu yang didalamnya terdiri dari proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan dengan fisik (Ihwan Nudin, 2016)

Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah disiapkan. Dengan melakukan wawancara peneliti akan menggali informasi lewat persepsi subjek penelitian pada suatu permasalahan.

Peneliti menggunakan teknik wawancara tak struktur untuk pengumpulan data. Gilham mendefinisikan bahwa wawancara tidak terstruktur kebalikan dari wawancara terstruktur yaitu tidak ada pedoman apapun (Samiaji Sarosa, 2017). Subjek peneliti diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengungkapkan apapun yang berkaitan dengan topik permasalahan. Dalam hal ini peneliti tidak memerlukan daftar pertanyaan untuk menuntun arah wawancara tetapi harus memiliki tujuan dan topik yang jelas sehingga wawancara tidak menyimpang.



3. Dokumen

Pengumpulan data dengan dokumen membantu dalam melengkapi metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka diartikan sebagai serangkaian metode pengumpulan data atau menghimpun informasi yang relevan dengan topik masalah yang menjadi objek penelitian. Sumber studi pustaka yang akan digunakan adalah jurnal penelitian, buku, media massa, dan website.

Analisis Data

Pada penelitian maka analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia di berbagai sumber, data dari wawancara, pengamatan, dokumen, gambar, foto, dan sebagainya. Pada saat selesai wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bisa jawaban yang diwawancarai belum jelas dan tidak mencukupi maka peneliti akan melanjutkan wawancara lagi.

Miles and Huberman (Sugiyono, 2020) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif hingga datanya mencukupi. Aktivitas yang akan dilalui berupa *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* yang akan dijelaskan berikut ini :

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Peneliti akan mendapatkan data yang sangat banyak dari lapangan maka dari itu perlu adanya pencatatan dan analisis secara rinci melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.



4. *Conclusion Drawing/Verification*

Terakhir yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Integrasi diartikan sebagai bentuk proses sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 menjadi peristiwa bersejarah bagi Indonesia karena kerusuhan ini merupakan kerusuhan diskriminasi rasial yang memakan kerugian dan korban jiwa. Maka dari itu, sebagai bangsa Indonesia yang akan keberagaman haruslah bisa hidup berdampingan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, masyarakat etnis Tionghoa merasa bahwa stereotype yang berkembang Ketika era Soeharto menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kerusuhan Mei 1998 karena pribumi yang merasa memiliki persaingan dagang dengan etnis Tionghoa yang saat itu stereotypenya bahwa etnis Tionghoa memonopoli perekonomian.

Adanya stereotype yang berkembang membuat masyarakat etnis Tionghoa di Glodok susah untuk bisa berintergrasi dengan masyarakat lainnya karena takut muncul kesalahpahaman. Begitu juga berlaku dengan masyarakat yang berbeda etnis.

Sehingga dengan adanya peristiwa kerusuhan Mei 1998 menjadi bom waktu walaupun lagi-lagi etnis Tionghoa harus menjadi korban lagi. Namun peristiwa ini membuat proses integrasi masyarakat Tionghoa di Glodok semakin cepat. Karena masyarakat memiliki kesamaan nasib Ketika dihadapkan oleh massa yang ingin menjarah pasar Glodok.

a. Proses integrasi masyarakat Tionghoa di pasar Glodok pada masa pemerintahan BJ Habibie

Setelah melakukan wawancara, masyarakat sama-sama sepakat bahwa lengsernya era Soeharto merupakan kemenangan bagi masyarakat Indonesia termasuk etnis Tionghoa di Indonesia. Karena ketidakpercayaan public terhadap pemerintah yang tidak lagi responsif menghadapi masalah serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah sangat melekat di tubuh pemerrintahan membuat era Soeharto harus segera dilengserkan.

Ketika masa era Habibie masyarakat etnis Tionghoa di Glodok berharap bahwa pemerintahannya bisa lebih baik dan menghapus stereotype tentang Tionghoa yang berkembang di masyarakat. Karena stereotype itu yang membuat integrasi masyarakat terhambat dan sering kali menimbulkan kesalahpahaman yang berujung konflik. Namun di masa awal BJ Habibie menjabat langsung memperhatikan etnis Tionghoa.

Pemerintah langsung melakukan turun tangan dan membantu masyarakat di Glodok yang menjadi korban atas kerusuhan Mei 1998. Tidak hanya masyarakat Tionghoa saja, tapi



juga masyarakat non-Tionghoa juga. Pemerintah membantu membangun rumah, toko, dan Gedung yang rusak karena massa.

Namun walaupun pemerintah BJ Habibie saat itu memang membantu masyarakat merenovasi rumah, toko, dan Gedung mereka. Berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa juga terdapat rumah dan toko yang ditinggalkan begitu saja. Tidak adanya renovasi ataupun perbaikan selama bertahun-tahun. Rumah dan toko tersebut bahkan masih rusak Ketika seperti Ketika kerusuhan Mei 1998.

Kemudian pemerintah BJ Habibie mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan tulisan-tulisan Cina. Kebijakan ini membuat masyarakat etnis Tionghoa di Glodok bisa memasang tulisan-tulisan Cina di toko mereka.

Masyarakat etnis Tionghoa merasa bahwa pembatasan yang dilakukan ketika era Soeharto mulai berkurang. Tulisan-tulisan Cina bisa dipergunakan di sekitar lingkungan pasar Glodok yang ditempel di toko-toko. Diperbolehkannya tulisan-tulisan Cina kemudian memunculkan adanya jual-beli kamus Bahasa Cina di Glodok, juga muncul di berbagai media. Kebijakan ini tentu juga melepas rindu masyarakat etnis Tionghoa menggunakan Bahasa kandung mereka.

Walaupun BJ Habibie mengeluarkan mengeluarkan kebijakan yang pro dengan Tionghoa, tapi masyarakat etnis Tionghoa merasa bahwa belum sepenuhnya stereotype yang berkembang di masyarakat hilang karena BJ Habibie menjabat hanya sebentar.

b. Proses integrasi masyarakat Tionghoa di pasar Glodok pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid

Masyarakat etnis Tionghoa menganggap bahwa pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai titik balik kehidupan masyarakat etnis Tionghoa di Glodok. Masyarakat merasa setelah aktivitas mereka dibatasi selama pada era orde baru akhirnya mendapatkan kebebasan melakukan kegiatan keagamaan dan adat istiadat Tionghoa.

Masyarakat etnis Tionghoa melihat Abdurrahman Wahid sebagai presiden yang menjunjung tinggi toleransi dan pluralis. Ketika diterapkannya Abdurrahman Wahid sebagai presiden menjadi kabar baik untuk masyarakat etnis Tionghoa yang kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan yang membebaskan masyarakat etnis Tionghoa.

Di masa pemerintahannya untuk pertama kalinya masyarakat etnis Tionghoa melakukan Imlek secara bebas Bersama seluruh masyarakat Tionghoa di Glodok. Masyarakat etnis Tionghoa bisa berbagi kebahagiaan kepada sesama warga di Glodok. Kebahagiaan dirayakan Imlek pertama kalinya dirasakan oleh seluruh masyarakat di Glodok. Dirayakannya Imlek di Glodok sebagai bentuk pertanda bahwa masyarakat Tionghoa di Glodok sudah bisa melakukan segala bentuk kegiatan keagamaan dan adat istiadat tanpa harus takut dengan masyarakat.

Masyarakat Tionghoa di Glodok bisa memperkenalkan budaya mereka kepada etnis lainnya di Glodok. Masyarakat di Glodok memberikan respon positif atas perkenalan yang



dilakukan oleh masyarakat etnis Tionghoa atas budaya mereka. Sehingga masyarakat sekitarpun ikut melestarikannya dalam berbagai bentuk yang salah satunya menjual dalam bentuk merchandise. Kemudian saat itu Glodok dikenal sebagai Pecinan.

Nilai-nilai pluralisme yang diajarkan oleh Abdurrahman Wahid juga menjadi pegangan masyarakat di Glodok dalam hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda etnik. Pluralisme mengajarkan menghormati dan menghargai. Jadi Ketika agama Islam tiba bulan Ramadhan kita bantu membersihkan masjid dan meramaikan Ketika buka puasa, Ketika Imlek mereka ikut Bahagia merayakan. Hal ini berlaku ke agama-agama lainnya.

Ketika masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, etnis Tionghoa bisa menjalani kehidupannya sebagai warga negara Indonesia. Masyarakat etnis Tionghoa di Glodok bisa hidup damai dan tenteram. Terutama masyarakat etnis Tionghoa bisa menampilkan Barongsai lagi. Yang sedari awal Barongsai hanya ditunjukkan di Wihara atau di dalam rumah, setelah itu masyarakat etnis Tionghoa bisa melakukannya secara bebas.

Pembahasan

Glodok, Kecamatan Tamansari merupakan salah satu wilayah di DKI Jakarta yang banyak dihuni oleh masyarakat etnis Tionghoa. Wilayah ini juga terdiri dari masyarakat yang multietnis. Kekayaan akan keberagaman yang ada di Glodok juga menjadi sumber konflik etnis yang menimpa etnis Tionghoa selama bertahun-tahun.

Pada 13-14 Mei 1998 menjadi hari penting bagi etnis Tionghoa. Karena peristiwa terjadi konflik dalam skala yang menyebabkan *multieffect*. Peristiwa diskriminasi rasial secara tidak langsung membawa perubahan besar bagi masyarakat Tionghoa serta peringatan untuk masyarakat Indonesia untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila mengingat masyarakat Indonesia yang multikultural.

Konflik menjadi salah satu gejala yang tidak bisa dihindarkan dalam masyarakat yang didiferensiasi. Akan tetapi adanya konflik akan mendorong masyarakat lahirnya integrasi, adanya konflik akan mendorong masyarakat bekerja sama (Torro, Gardono, & Rahman, 2014) Yang kemudian peristiwa 1998 menjadi peristiwa yang membantu proses integrasi masyarakat etnis Tionghoa di Glodok.

Ketika terjadinya kerusuhan Mei 1998 masyarakat menyadari, bahwa jika mereka tidak bekerja sama mungkin rumah warga yang berada di gang-gang Glodok akan ikut terbakar. Masyarakat di Glodok mulai menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama sehingga mereka sepakat untuk mencapai tujuan Bersama sebagai satu kesaatuan masyarakat Glodok.

Proses Integrasi yang dimaksud sebagai bentuk proses sosial yang dilaksanakan oleh pihak masyarakat sebagai bentuk mengatasi persoalan yang melatarbelakangi adanya konflik sosial dan ancaman yang berasal dari pihak lain dalam masyarakat (Sastroadmodjo, et al., 2023). Karena berbagai konflik yang terjadi sering kali berasal dari masyarakat luar Glodok, sehingga masyarakatpun menyepakati bahwa masyarakat menghadapi musuh yang sama yaitu Diskriminasi Rasial yang seringkali disebabkan oleh masyarakat luar.

Diskriminasi Rasial tidak hanya dilakukan oleh etnis Tionghoa kepada etnis Tionghoa saja. Namun, kepada sesama pribumi juga sering dilakukan. Maka dari itu muncul kesadaran dan rasa



kemanusiaan Ketika peristiwa 1998 berlangsung. Masyarakat langsung menyadari, bahwa tugas mereka selain melindungi wilayah adalah melindungi masyarakat etnis Tionghoa karena mereka memiliki hak yang sama dengan mereka etnis non Tionghoa.

Namun akan sangat sulit membuat masyarakat yang terdiri dari etnis dan agama yang beragam hidup berdampingan kecuali mereka sudah menanamkan nilai-nilai baik yang membuat mereka bisa hidup berdampingan saling menghormati satu sama lain. Maka proses integrasi memiliki peranan penting agar suatu masyarakat bisa hidup berdampingan. Integrasi sosial tentu harus dilaksanakan oleh pihak-pihak dalam masyarakat guna untuk mengatasi masalah yang melatarbelakangi adanya konflik dari pihak-pihak lain di masyarakat (Sastroadmodjo, et al., 2023).

Maka dari itu pentingnya peran pemerintah dalam membuat kebijakan yang mengatur dan menjadi proses integrasi masyarakat etnis Tionghoa di Glodok. Tentu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah bisa menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan secara prinsip haruslah sebagai upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asa keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Muhadjir, 2000).

Akan tetapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Soeharto membatasi masyarakat etnis Tionghoa melalui kebijakan yang dikeluarkan melalui Inpres No.14 tahun 1967 yang berisi tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Peraturan ini yang kemudian membatasi kegiatan keagamaan dan adat istiadat masyarakat etnis Tionghoa di Glodok. Masyarakat menjadi susah untuk mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan hari besar agama (Fittrya, 2013)

Ketika era Soeharto ada kebijakan yang bertujuan untuk membantu integrasi masyarakat etnis Tionghoa yang dikeluarkan pada 1966 melalui kebijakan ganti nama yang tertuang dalam Kep. Pres. Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966. Peraturan ini pada era Orde Baru yang menyebutkan tentang WNI keturunan asing melalui proses asimilasi untuk mencegah terjadinya kehidupan eksklusif rasial maka adanya anjuran nama suapa WNI dengan keturunan asing mengganti nama Cina dengan nama Indonesia (Fittrya, 2013)

Bagi masyarakat Tionghoa di Glodok mereka tidak ada pilihan lain selain mengikuti kebijakan pemerintah saat itu. Karena yang ditakutkan Ketika tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, masyarakat akan mendapatkan kesulitan dalam berbagai hal. Bahkan dalam penulisan agama pun walaupun agama mereka Konghucu mereka tidak menempatkannya di KTP. Sehingga, mereka menuliskan agama di KTP sebagai Kristen atau Buddha.

Berbagai kebijakan di era Soeharto yang dianggap sangat diskriminatif kepada masyarakat etnis Tionghoa. Pemerintah Orde Baru sangat membatasi masyarakat etnis Tionghoa mulai dari kegiatan keagamaan seta adat istiadat. Maka dari itu, dengan lengsernya Soeharto kemudian dilanjutkan oleh BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat etnis Tionghoa. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat membantu proses integrasi masyarakat etnis Tionghoa di Glodok, kemudian dijelaskan berikut ini :

a. Masa pemerintahan BJ Habibie

Pada masa pemerintahan BJ Habibie dikenal sebagai permulaan dari era reformasi. Akan tetapi Ketika BJ Habibie menjabat, era Soeharto meninggalkan banyak sekali masalah terutama peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang menjadi salah satu peristiwa diskriminasi rasial yang berdampak kepada etnis Tionghoa kemudian memiliki *multieffect* di masyarakat.



Soeharto menyatakan mengundurkan diri bersamaan dengan dilantiknya BJ Habibie pada 21 Mei 1998. Kemudian pada 5 Juni Presiden BJ Habibie melakukan peninjauan kepada sejumlah pasar di DKI Jakarta termasuk pasar Glodok. Di Pasar Glodok BJ Habibie melakukan dialog kepada para pedagang etnis Tionghoa yang menjadi korban kerusuhan. Kemudian pemerintah berjanji akan melakukan perbaikan pasar Glodok dan Orion Plaza (Fuji Titulanita, 2014)

Dalam melakukan perbaikan, terdapat dua tahapan perbaikan yang dilakukan yaitu pada bulan Februari 1999 dan April 1999. Pada bulan Februari Gedung-gedung yang rusak dan terbakar dirobokkan dan dilakukan penggarapan. Kemudian pada April dilakukan rehabilitasi. Renovasi Gedung memakan biaya sebanyak 25 Milyar oleh pemerintah untuk perbaikan pasar Glodok dan Orion Plaza (Fuji Titulanita, 2014)

Di era awal reformasi mulai bermunculan partai politik serta organisasi yang bergerak di bidang sosial politik berbasis etnis Tionghoa membuat pilar pertama dari budaya Tionghoa dapat Terobati. Partai politik yang tiga diantaranya didominasi oleh partai etnis Tionghoa yaitu Partai Reformasi Tionghoa (Parti), Partai Pembauran Indonesia dan Partai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, LSM yang bergerak di bidang etnis Tionghoa yaitu Pengayuban Marga Sosial Tionghoa Indonesia yang kemudian berganti menjadi Perhimpunan Keturunan Tionghoa Indoneisa, Ganti, Simpatik, Solidaritas Nusa-Bangsa, dan sebagainya. LSM dan Partai politik yang dibangun secara khusus untuk menghadapi diskriminasi rasial di Indonesia (Putri, Zaina, & Rizki, 2022)

Tak lama setelah pembentukan partai yang didirikan oleh etnis Tionghoa, penggunaan Bahasa mandarin sebagai Bahasa ibu etnis Tionghoa boleh digunakan Kembali. Majalan berbahasa Tionghoa serta kamus Bahasa mandarin Kembali diperjualbelikan di Jakarta (Putri, Zaina, & Rizki, 2022)

Masyarakat di Glodok Ketika era Soeharto masih menggunakan klasifikasi masyarakat berdasarkan Tionghoa dan Pribumi. Diketahui bahwa klasifikasi kelas ini adalah peninggalan dari politik Belanda. Pembagian kelas ini secara tidak langsung membawa dan merawat stereotype bahwa etnis Tionghoa derajatnya lebih tinggi dibandingkan masyarakat Pribumi.

Kemudian BJ Habibie menghapus istilah pribumi dan non pribumi dalam kebijakan yang dikeluarkan melalui Inpres No.26 tahun 1998. Kemudian kebijakan ini juga mengarahkan agar birokrasi di pemerintahan bisa memperlakukan semua warganya sama rata tanpa membedakan-bedakan etnis. Lalu pada Inpres No.4 tahun 1999 menghapuskan Surat Bukti Kewarganegaraan RI. (Putri, Zaina, & Rizki, 2022)

Dengan diterapkannya kebijakan tersebut sehingga tidak ada lagi gap sosial yang menjadi pembeda kewarganegaraan antara pribumi dan Tionghoa. Hal ini juga mengurangi bagaimana stereotype yang berkembang di masyarakat. Sehingga membantu masyarakat etnis Tionghoa di Glodok bisa terintegrasi oleh masyarakat.

**b. Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid**

Gus Dur mulai ditetapkan sebagai Presiden pada tanggal 17 Januari 2000 yang kemudian Gus Dur mengambil keputusan yang monumental melalui Instruksi Presiden No. 6/2000 yang isinya mencabut Inpres No.14/1967. Kebijakan ini kemudian melahirkan kebebasan etnis Tionghoa bisa menjalankan adat istiadat dan keagamaan secara bebas di Indonesia (Mustajab, *KEBIJAKAN POLITIK GUS DUR*, 2015)

Abdurrahman Wahid atau dikenal sebagai Gus Dur ketika menjabat sudah dikenal oleh masyarakat etnis Tionghoa di Glodok sebagai tokoh yang pluralis memberikan kebebasan kepada semua agama. Prinsip-prinsip Gus Dur yang kemudian membantu integrasi masyarakat etnis Tionghoa di Glodok dengan masyarakat non Tionghoa dengan menanamkan nilai-nilai toleransi.

Karena kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur, Masyarakat etnis Tionghoa di Glodok yang mengalami pembatasan melakukan aktivitas adat istiadat dan keagamaan yang cukup pada era Soeharto akhirnya mengalami pembebasan. Masyarakat Tionghoa di Glodok awalnya hanya melakukan kegiatan adat istiadat dan keagamaan hanya bisa di dalam rumah saja dan di tempat keagamaan tapi benar-benar tertutup.

Berbagai macam kebudayaan dan adat istiadat Cina mulai berkembang di Glodok mulai dari perayaan Imlek, Barong Sai, Menggunakan Tulisan Cina secara bebas, dan berbagai kebudayaan Cina lainnya yang Ketika zaman era Soeharto terbatas menjadi bebas untuk dilakukan secara publik. Masyarakat Etnis Tionghoa di Glodok bisa melakukan perayaan Imlek dengan penuh kebebasan. Hal ini sangat disyukuri oleh masyarakat Tionghoa di Glodok karena sebelumnya mereka tidak mendapatkan kebebasan.

Kemudian, nilai-nilai toleransi yang sangat menempel pada Gus Dur mengajarkan masyarakat di Glodok untuk bisa hidup berdampingan dan saling menghormati satu sama lain. Nilai-nilai ini membuat masyarakat etnis Tionghoa di Glodok juga memiliki hak-hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan karena etnis Tionghoa memang juga bagian dari Warga Negara Indonesia. Sehingga pengakuan Warga Negara Indonesia tidak berdasarkan secara hukum saja, tapi masyarakat sudah mengerti bahwa masyarakat Tionghoa juga bagian dari Indonesia.

Nilai-nilai toleransi yang dimaksud adalah menjunjung tinggi kesetaraan dan kemanusiaan dalam segala urusan. Keyakinan ini diyakini Gus Dur bahwa dalam ajaran agamanya yaitu agama Islam merupakan ajaran yang sempurna karena menetapkan prinsip-prinsip umum agar dapat menjadi pedoman manusia dalam menjalan aktivitas kehidupan. Akan tetapi toleransi disini tidak hanya ditujukan kepada kaum muslimin saja, tapi juga secara tegas kepada seluruh umat manusia. Bahwa kemanusiaan di atas segalanya.

Karena masyarakat etnis Tionghoa bisa melakukan kegiatan keagamaan dan adat istiadat membuat Glodok dikenal sebagai pecinan. Sehingga kebudayaan Cina diterima dan diolah ke dalam masyarakat sehingga terjadinya Asimilasi. Dimana masyarakat di Glodok mulai beradaptasi dan menghormati keberadaan adanya etnis Tionghoa di Indonesia. Ketika masyarakat etnis Tionghoa merayakan, masyarakat non Tionghoa juga ikut bisa merayakan dan merasakan kegembiraan.



Kemudian muncul peredaran tabloid Glodok standar berbahasa mandarin yang diterbitkan oleh PT Merdeka Cakrawala dibawah penerbitan Jawa Post yang memuat iklan disepertaran pusat bisnis di Kawasan Glodok. Kemudian Kawasan ini dijadikan sebagai pusat grosir yang dikenal sebagai kebudayaan Tionghoa. Pada tanggal 16 Februari 2000 Glodok melakukan perayaan Imlek secara terbuka di Wihara Dharma Bakti dengan menampilkan berbagai budaya etnis Tionghoa dengan warna ciri khasnya yaitu warna merah, berbagai lampion dengan tulisan Cina, makanan dan pernak-pernik yang berciri khas Tionghoa di jajakan di pasar petak Sembilan (Fitrya, 2013)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai-nilai toleransi menjadi faktor terbesar masyarakat Tionghoa bisa hidup berdampingan dengan masyarakat multi-etnik di Glodok tanpa adanya konflik pasca kerusuhan Mei 1998 hingga saat ini. Nilai toleransi tidak hanya diterapkan oleh masyarakat Tionghoa saja akan tetapi juga diterapkan oleh masyarakat multi-etnik di Glodok.
2. Peran pemerintah sangat penting dalam menjaga kerukunan dan kedamaian masyarakat multi-etnik. Masyarakat Tionghoa di Glodok bisa melakukan aktivitas sosial-budaya setelah diterapkannya kebijakan pada era Gusdur dan Habibie. Maka dari itu, pemerintah harus selalu membuat kebijakan berpihak pada masyarakat dan tidak boleh lengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, M. K. (2022). INPRES NO 14 TAHUN 1967: BENTUK DISKRIMINASI PEMERINTAH ORDE BARU. *Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi*, 01-12.
- Djunaidi Ghony, S. W. (2020). *Analisis dan Interpretasi Data Penelitian Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Ginting, S. O., M, S., & Ekwandari, Y. (2019, Oktober 1). Etnis Tionghoa pada Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Retrieved 01 07, 2023
- Ihwan Nudin, S. (2016). *Penelitian Kualitatif Untuk Lmi Sosial dan Politik*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Mustajab, A. (2015, November). Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 5(1), 153-192.
- Risky Ananda Putri, M. Z. (2022). Melacak Kebijakan Politik Terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia. *Polikrasi: Journal of Politics and Democracy*, 17-27.
- Samiaji Sarosa, S. M. (2017). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Jakarta Utara: Indeks Jakarta.
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. (S. Y. Suryandari, Ed.) Bandung, Bandung, Indonesia: Alfabeta. Retrieved 01 05, 2023



Suryadinata, L. (2010). *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Titulanita, F., Sumardiati, S., & W, R. E. (2015, Maret). KERUSUHAN PASAR GLODOK: STUDI KASUS ETNIS TIONGHOA DI. *Jurnal Publika Budaya*, 1(3), 10 - 19. Retrieved 01 07, 2023